

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI  
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN BELANJA MODAL TERHADAP  
TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

**ANDRI YULIYANTO**

**B200 140 221**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI  
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN BELANJA MODAL TERHADAP  
TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh :

**ANDRI YULIYANTO**

**B 200 140 221**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



**(Drs. Wahyono, M.A., Akt)**  
**NIDN. 0009035801**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI  
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN BELANJA MODAL TERHADAP  
TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016)**

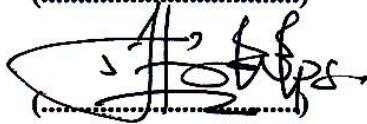
Oleh:

**ANDRI YULIYANTO**  
**B 200 140 221**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Kamis, 08 Maret 2018  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

- 1. Drs. Wahyono, M.A.,Akt.  
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Shinta Permata Sari, S.E.,M.M.  
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Eny Kusumawati, S.E.,AK.,M.M,CA  
(Anggota II Dewan Penguji)**

  
.....  
  
.....  
  
.....



Dekan,

  
**Dr. Syamsudin, M.M)**  
**NIDN. 0017025701**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 08 Maret 2018

Penulis



**ANDRI YULIYANTO**  
B200140221

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI  
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN BELANJA MODAL TERHADAP  
TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan sampel 112 kabupaten / kota. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2016. Analisis menggunakan uji asumsi klasik dan kemudian diuji hipotesis dengan metode regresi linier berganda dengan uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi khusus (DAK) mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, variabel dana alokasi umum (DAU) dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, dan Kemandirian Keuangan daerah.

**ABSTRACT**

*This research aim to analyse influence of local genuine revenues (PAD), public allocation fund (DAU), special allocation fund (DAK), and capital expenditure to the level regional financial independence at Government of Regency/Municipality in the Province of East Java in 2014-2016. Population in this research is all Regency/Municipality in the Province of East Java in 2014-2016. This research uses purposive sampling method. This research uses a sample of 112 regencies/municipalities. This research data using secondary data obtained from budget realization report at Regency/Municipality in the Province of East Java in 2014-2016 based on Audit report of local government financial report. Analysis using classical assumption test and then tested hypothesis using multiple linear regression method with coefficient of determination test, F test, and t test. The results showed that the variables of local genuine revenues (PAD) and special allocation fund (DAK) affect the level regional financial independence. Meanwhile, variable of public allocation fund (DAU) and capital expenditure has no effect to the level regional financial independence.*

**Keywords:** Local Genuine Revenues, Public Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure and The Level Regional Financial Independence.

**1. PENDAHULUAN**

Dikeluarkannya Undang-Undang No.22 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah, menjadi langkah awal dalam memulai otonomi daerah serta desentralisasi fiskal. Sehingga pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan (Sulianti dan Ika, 2012).

Adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Begitu pula dengan keuangan daerah tersebut, diharapkan pula dapat tercapai kemandirian keuangan. Kemandirian tersebut dapat ditinjau dari besarnya pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh. Semakin besar PAD dibandingkan dengan bantuan yang diberikan pemerintah pusat maka dikatakan mandiri (Muliana,2009).

Pendapatan asli daerah (PAD) digunakan dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah karena PAD merupakan sumber pembiayaan yang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Jika struktur PAD kuat, maka memiliki kemampuan pembiayaan yang juga kuat. Sementara dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) serta berbagai bentuk transfer lainnya dari pemerintah pusat hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Jika PAD yang diperoleh daerah itu tinggi sedangkan DAU dan DAK yang diterima rendah maka hal tersebut menandakan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri (Muliana,2009).

Pendapatan asli daerah (PAD) dapat dipisahkan menjadi empat jenis yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain PAD yang sah. Dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana perimbangan yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah. DAU dialokasikan ke daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi, sedangkan DAK dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu (Halim,2002:64).

Pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki kapasitas fiskal rendah cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Rendahnya kapasitas fiskal mengindikasikan

tingkat kemandirian daerah yang rendah. Daerah dituntut dapat mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah dalam bentuk belanja modal yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Pemberian porsi belanja modal yang lebih besar dimaksudkan untuk peningkatan investasi modal serta pembangunan berbagai fasilitas modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Adi,2006).

Namun dalam implementasi otonomi daerah terdapat kendala yang dihadapi salah satunya adalah adanya disparitas (kesenjangan) fiskal antar daerah. Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi fiskal saat ini masih didominasi oleh bantuan dari Pemerintah Pusat baik dalam bentuk DAU, DAK dan bagi hasil. Secara rata-rata nasional, PAD hanya memberikan kontribusi 12-15% dari total penerimaan daerah, sedangkan kurang lebih 70% masih menggantungkan bantuan dari Pemerintah Pusat (Kemendagri). Adi (2008) menjelaskan bahwa Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang relative besar, sebaliknya daerah yang mempunyai kemampuan fiskal tinggi akan mendapat DAU dalam jumlah yang kecil.

Pemberian dana alokasi umum (DAU) ini diharapkan benar-benar dapat mengurangi disparitas fiskal horizontal, sehingga daerah mempunyai tingkat kesiapan fiskal yang relatif sama dalam mengimplementasikan otonomi daerah, mampu mengalokasikan sumber dana ini pada sektor-sektor produktif sehingga mendorong adanya peningkatan investasi di daerah dan juga pada sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik, yang harapannya juga dapat meningkatkan kontribusi publik terhadap pajak. Kemandirian daerah menjadi semakin tinggi seiring dengan meningkatnya kapasitas fiskal daerah, sehingga tanggungan pemerintah pusat untuk memberikan DAU bisa dikurangi. Namun realitas menunjukkan bahwa dalam perkembangannya daerah tidak menunjukkan adanya peningkatan kemandirian. Pemberian DAU yang seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian daerah, justru direspon berbeda oleh daerah. Daerah tidak menjadi lebih mandiri namun semakin bergantung pada pemerintah pusat (Adi,2008).

Sementara meningkatnya porsi anggaran belanja modal tidak selamanya diiringi dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu daerah yang merupakan

indikator kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut diduga karena terdapat kecenderungan penyerapan dan realisasi anggaran belanja modal yang rendah, jauh dibawah porsi dana yang telah ditetapkan dalam APBD dan belanja modal yang terjadi masih kurang merata sehingga menyebabkan ketimpangan antar daerah. Fenomena tersebut disinyalir akan menghambat pembangunan infrastruktur yang akan mengakselerasi kegiatan perekonomian yang kemudian berpengaruh terhadap penerimaan PAD yang diakibatkan oleh rendahnya serapan anggaran belanja modal pemerintah daerah (Imawan dan Wahyudin,2014).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016)”**.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **2.1 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2016. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38 kabupaten/kota.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* dengan kriteria Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dan telah diaudit oleh BPK-RI serta dapat diakses. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2014-2016 yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diperiksa oleh BPR-RI atau yang ada dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2014-2016.

### **2.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

#### **2.2.1 Variabel Dependen**

##### **2.2.1.1 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemandirian keuangan daerah. Menurut Halim (2008:232) Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Menurut Halim (2001:263) Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila semakin kecil tingkat ketergantungannya. Rumus menghitung rasio kemandirian dalam penelitian ini adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

## **2.2.2 Variabel Independen**

### **2.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Halim (2002:64) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pemungutannya didasari oleh peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cakupannya yaitu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Variabel ini diukur melalui besarnya realisasi pendapatan asli daerah yang diperoleh kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran.

### **2.2.2.2 Dana Alokasi Umum**

Menurut Halim (2001:127) Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Variabel ini diukur melalui besarnya dana alokasi umum yang diperoleh daerah kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran.

### **2.2.2.3 Dana Alokasi Khusus**

Menurut Suparmoko (2006:43) Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan ke kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, kebutuhan khusus yang dimaksud adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum dan/atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Variabel ini diukur melalui besarnya dana alokasi khusus yang diperoleh daerah kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran.

#### 2.2.2.4 Belanja Modal

Menurut Darise (2007:148) belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan belanja modal lainnya. Variabel ini diukur melalui besarnya realisasi belanja modal daerah kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran.

Uji hipotesis ini menggunakan metode analisis regresi berganda (Multiple Linear Regression Method). Analisis ini digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah :

$$KKD_t = \alpha + \beta_1 PAD_{t-1} + \beta_2 DAU_{t-1} + \beta_3 DAK_{t-1} + \beta_4 BM_{t-1} + \varepsilon$$

Keterangan:

KKD = Kemandirian keuangan daerah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien jalur

t = Tahun penelitian

t-1 = Tahun sebelumnya

PAD = Pendapatan asli daerah

DAU = Dana alokasi umum

DAK = Dana alokasi khusus

BM = Belanja modal

$\varepsilon$  = Error

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusi normal, tidak mengandung autokorelasi, multikoloniaritas, dan heteroskedastisitas.

### 3.2 Uji Normalitas

Cara untuk menguji normalitas adalah dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk menentukan normalitas distribusi residual. Jika sig atau p-value > 0,05 maka data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan *one sample Kolmogorov Smirnov test* adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Uji Normalitas

| Variabel                       | p-value | Ketentuan | Kesimpulan             |
|--------------------------------|---------|-----------|------------------------|
| <i>Unstandardized Residual</i> | 0,342   | > 0,05    | Distribusi data normal |

Sumber : Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa variabel *unstandardized residual* memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan bahwa distribusi data normal.

### 3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Pendekatan yang sering digunakan untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi adalah uji *Durbin-Watson*.

Tabel 2. Uji Autokorelasi

| <i>Durbin-Watson</i> | Ketentuan      | Kesimpulan                 |
|----------------------|----------------|----------------------------|
| 1,658                | $-2 < DW < +2$ | Tidak terjadi autokorelasi |

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,658 dimana berada diantara -2 sampai +2 sehingga persamaan model regresi dalam penelitian ini bebas dari permasalahan autokorelasi.

### 3.4 Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dengan melihat besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), apabila *tolerance* < 0,10 dan nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

| Variabel               | Tolerance | VIF   | Kesimpulan                      |
|------------------------|-----------|-------|---------------------------------|
| Pendapatan asli daerah | 0,156     | 6,408 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| Dana alokasi umum      | 0,478     | 2,091 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| Dana alokasi khusus    | 0,469     | 2,131 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| Belanja Modal          | 0,121     | 8,240 | Tidak terjadi multikolinearitas |

Sumber : Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas dalam model regresi.

### 3.5 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian dilakukan dengan Uji Park. Nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka diketahui bahwa tidak ada hubungan antara variabel independen dengan nilai residual sehingga menunjukkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

| Variabel               | p-value | Ketentuan | Kesimpulan                        |
|------------------------|---------|-----------|-----------------------------------|
| Pendapatan asli daerah | 0,330   | >0,05     | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| Dana alokasi umum      | 0,763   | >0,05     | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| Dana alokasi khusus    | 0,273   | >0,05     | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| Belanja modal          | 0,573   | >0,05     | Tidak terjadi heteroskedastisitas |

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi.

### 3.6 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

| Variabel                | $\beta$     | t <sub>hitung</sub> | Sig.  | Keterangan  |
|-------------------------|-------------|---------------------|-------|-------------|
| Konstanta               | 15,125      | 15,710              | 0,000 |             |
| Pendapatan asli daerah  | 1,844E-005  | 10,595              | 0,000 | H1 diterima |
| Dana alokasi umum       | -2,251E-006 | -1,494              | 0,138 | H2 ditolak  |
| Dana alokasi khusus     | -3,354E-005 | -3,155              | 0,002 | H3 diterima |
| Belanja modal           | -2,748E-006 | -0,692              | 0,490 | H4 ditolak  |
| R <sup>2</sup>          | 0,860       |                     |       |             |
| Adjusted R <sup>2</sup> | 0,855       |                     |       |             |
| F <sub>hitung</sub>     | 164,922     |                     |       |             |
| Sig                     | 0,000       |                     |       |             |

Sumber : Data sekunder diolah, 2018

### 3.7 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil pengujian variabel pendapatan asli daerah diperoleh t<sub>hitung</sub> sebesar 10,595 > t<sub>tabel</sub> sebesar 1,982 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < batas signifikansi sebesar 0,05, maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima. Hal tersebut berarti pendapatan asli

daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah terbukti secara statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Kemandirian dalam APBD terkait dengan kemandirian pendapatan asli daerah, sebab semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah, bukan dari bantuan pemerintah pusat/provinsi, maka daerah dapat dikatakan mandiri secara keuangan dan daerah tersebut semakin leluasa mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

### **3.8 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Hasil pengujian variabel dana alokasi umum diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar  $-1,494 < t_{tabel}$  sebesar  $-1,982$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,138 >$  batas signifikansi sebesar  $0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak. Hal tersebut berarti dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah terbukti secara statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Penggunaan dana alokasi umum yang dialokasikan oleh pemerintah pusat belum digunakan dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh daerah berarti penggunaan dana tersebut belum mencapai target atau tujuan kepentingan publik serta penggunaannya belum untuk menghasilkan output yang maksimal atau berdaya guna. Hal ini terlihat dengan masih rendahnya rata-rata pendapatan asli daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan rata-rata dana alokasi umum yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan dana alokasi umum yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada daerah belum dimanfaatkan untuk sektor-sektor produktif yang dapat memberikan kontribusi yang besar kepada pendapatan asli daerah, serta lebih digunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif dan spekulatif, oleh sebab itu dana alokasi umum tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

### **3.9 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Hasil pengujian variabel dana alokasi khusus diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar  $-3,155 > t_{tabel}$  sebesar  $-1,982$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,002 <$  batas signifikansi sebesar  $0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. Hal tersebut berarti dana alokasi

khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah terbukti secara statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Semakin besar transfer dana alokasi khusus dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan daerah semakin rendah, sebaliknya semakin kecil transfer dana alokasi khusus dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan semakin tinggi. Penerimaan dana alokasi khusus yang besar disebabkan kemampuan pembiayaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah masih rendah. Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional serta untuk membantu daerah untuk mendanai kegiatan investasi pembangunan, pengadaan serta peningkatan sarana dan prasarana fisik dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah serta lingkungan hidup.

### **3.10 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Hasil pengujian variabel belanja modal diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,692 < t_{tabel}$  sebesar  $-1,982$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,490 > \text{batas signifikansi}$  sebesar  $0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_4$  ditolak. Hal tersebut berarti belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah terbukti secara statistik. Meningkatnya porsi anggaran belanja modal tidak selamanya diiringi dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu daerah yang merupakan indikator kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut karena terdapat kecenderungan penyerapan dan realisasi anggaran belanja modal yang rendah, jauh dibawah porsi dana yang telah ditetapkan dalam APBD dan belanja modal yang terjadi masih kurang merata sehingga menyebabkan ketimpangan antar daerah. Fenomena tersebut disinyalir akan menghambat pembangunan infrastruktur yang akan akselerasi kegiatan perekonomian yang kemudian berpengaruh terhadap penerimaan PAD yang diakibatkan oleh rendahnya serapan anggaran belanja modal pemerintah daerah.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana alokasi khusus dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

### **4.2 Keterbatasan**

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang meliputi ruang lingkup yang hanya mencakup data dan kondisi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur secara statistik dan informasi tertulis tentang APBD pada tahun 2014-2016 dan penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal yang digunakan untuk menganalisis pengaruh-pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu kemandirian keuangan daerah sehingga hasil penelitian ini belum dapat menjelaskan semua variabel yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, serta penelitian ini hanya menggunakan data sekunder laporan realisasi APBD yang datanya masih kurang lengkap dan sangat membatasi alur penelitian, sehingga hal ini menjadikan hasil penelitian ini tidak mewakili pembahasan yang benar-benar menjadi permasalahan dari kemandirian keuangan daerah.

### **4.3 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini dikemukakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, yaitu Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan ruang lingkup secara lebih luas agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan akurat serta bisa memberikan gambaran yang lebih riil tentang kemandirian keuangan daerah dengan menggabungkan laporan rencana dan realisasi anggaran dari berbagai instansi terkait. Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih banyak menggunakan variabel independen dan untuk menggunakan variabel moderating sebagai bagian dari interaksi yang diduga mampu menjelaskan secara maksimal variasi terhadap variabel dependen. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan data sekunder dari laporan realisasi APBD, tetapi juga melalui metode observasi atau pengamatan terhadap obyek secara langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan Antaraa Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Dana Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Se Jawa- Bali). Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- Adi, Priyo Hari. 2008. Relevansi Transfer Pemerintah Pusat Dengan Upaya Pajak Daerah. Jurnal Kritis. Universitas Satya Wacana. Salatiga.
- Ariani, Kurnia Rina dan Putri, Gustita Arnawati. 2015. “Pengaruh Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. ISSN. 2460-0784.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2014-2016. Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
- Darise, Nurlan. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Indeks.
- Ernawati. 2017. “Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. ISSN. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Vol. 6, No. 2, 2460-0585.
- Erstelita. 2015. “Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat)”. Artikel Ilmiah. Universitas Negeri Padang.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19. Edisi Kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, Waskito. 2010. Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Kemandirian Daerah (Studi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 di Wilayah Provinsi Aceh. BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. Jurnal Riset Akuntansi, Vol: 3 No.1 Januari 2010.
- Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2008. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikasari, Putri. 2015. “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014)”. Artikel. Universitas PGRI Yogyakarta.

- Imawan, Riswanda, dan Wahyudin, Agus. 2014. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. *Accounting Analysis Journal*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Lestari, dkk. 2016. “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara”. ISSN. Universitas Halu Oleo Kendari. Vol. 1, No. 2, 2502-5171.
- Marizka, Reza. 2013. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2006 – 2011”. Artikel Ilmiah. Universitas Negeri Padang.
- Muliana. 2009. Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Nur’ainy, Renny dkk. 2013. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota Di Jawa Barat)”. ISSN. Universitas Gunadarma Jakarta. Vol. 5, 1858-2559.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Putri dan Sjadili. 2013. “Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pinjaman Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2006-2010)”. *Jurnal Publikasi*. Universitas Indonesia.
- Republik, Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik, Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik, Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Santoso, Singgih. 2000. SPSS Statistik Parametrik. Elex Media Komputindo.

- Saputra, Dori. 2014. "Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Barat". Artikel Ilmiah. Universitas Negeri Padang.
- Saruc, Naci Tolga dan Isa Sagbas. 2008. The Surge Impact Of The Fypaper, Substituion And Stimulation Effect On Local Tax Effort In Turkey. International Research Journal Of Finance And Economics. Euro Journals Publishing.
- Sulianti dan Ika, Siti Rochmah. 2012. "Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah". Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra, Vol. 3, No.2 Hal 123-138.
- Suparmoko. 2006. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: ANDI.
- Susanti, dkk. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014)". ISSN. Universitas Telkom Bandung. Vol. 3, No. 3, 2355-9357.
- Tahar, Afrizal dan Zakhya, Maulida. 2011. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah". Jurnal Akuntansi dan Investasi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 12, No.1 Hal 88-99.
- <http://www.keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/23-dau-pegang-peranan-penting-untuk-pembangunan-daerah> (diakses 15 Desember 2017 pukul 20.00 WIB)
- [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) (diakses 17 Desember 2017 pukul 17:00 WIB)